

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pembangunan industri di Indonesia dimulai sejak Pelita II, bersamaan dengan masuknya penanaman modal dari luar negeri (PMA). Kebijakan ini terutama untuk mendorong terciptanya struktur perekonomian yang seimbang, sehingga diharapkan terjadi transformasi struktural perekonomian, dari dominasi sektor pertanian ke dominasi sektor industri, termasuk agroindustri di dalamnya. Agroindustri merupakan industri yang pada umumnya mengandalkan sumberdaya alam lokal yang mudah rusak, bulky/voluminous, tergantung kondisi alam, bersifat musiman, serta teknologi dan manajemennya akomodatif terhadap heterogenitas sumberdaya manusia (dari tingkat sederhana sampai teknologi maju) dengan kandungan bahan baku lokal yang tinggi. Agroindustri memiliki peranan strategis dalam upaya pemenuhan bahan kebutuhan pokok, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, pemberdayaan produksi dalam negeri, perolehan devisa, pengembangan sektor ekonomi lainnya, serta perbaikan perekonomian masyarakat di pedesaan (**Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 2000**).

Pengembangan agroindustri dapat menjadi pilihan yang strategis dalam menanggulangi permasalahan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di pedesaan. Hal ini disebabkan adanya kemampuan yang tinggi dari sektor agroindustri dalam hal perluasan kesempatan kerja. Pengembangan agroindustri yang berbasis pada masyarakat pedesaan merupakan sektor yang sesuai untuk menampung banyak tenaga kerja dan menjamin perluasan berusaha, sehingga akan efektif dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan (**Bangun, 1989**).

Berkembangnya agroindustri juga akan meningkatkan penerimaan devisa dan mendorong terjadinya keseimbangan pendapatan antara sektor pertanian dan non pertanian. Dengan demikian, kebijakan pembangunan agroindustri diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di wilayah produksi pertanian dan mendorong penawaran hasil-hasil pertanian untuk kebutuhan agroindustri. Agroindustri sebagai penarik pembangunan sektor pertanian diharapkan mampu berperan dalam menciptakan pasar bagi hasil-hasil pertanian melalui berbagai produk olahannya. Agar agroindustri dapat berperan sebagai penggerak utama, industrialisasi pedesaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu: berlokasi di pedesaan, terintegrasi vertikal ke bawah, mempunyai kaitan input-output yang besar dengan industri lainnya, dimiliki oleh penduduk desa, padat tenaga kerja, tenaga kerja berasal dari desa, bahan baku merupakan produksi desa, dan produk yang dihasilkan terutama dikonsumsi pula oleh penduduk desa (Simatupang dan A. Purwoto, 1990).

Menurut Abdi (1995) sektor agroindustri di Sumatera Utara memiliki kemampuan untuk mendorong peningkatan produksi sektor menggunakan outputnya lebih kuat dari pada kemampuan untuk mendorong sektor upaya yang memberikan input baginya. Pada periode tahun 1997 sampai dengan 2000 sektor pertanian industri pengolahan dan perdagangan memberikan kontribusi di atas 71% terhadap PDRB Sumatera Utara, sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah ini sangat tergantung pada ketiga sektor tersebut.

Provinsi Sumatera Utara memiliki keunikan tersendiri dalam kerangka perekonomian nasional. Provinsi ini adalah daerah agraris yang menjadi pusat pengembangan perkebunan dan hortikultura. Kepala Sub Program Dinas Pertanian